



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**UNIT KERJA** : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
**SUB UNIT KERJA** : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NAZWIR**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **242998**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.101.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m2/156 m2 di KOTA PADANG ,  
HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 399 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp.  
60.000.000
3. Tanah Seluas 3481 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp.  
27.600.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp.  
24.000.000
5. Tanah Seluas 2865 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp.  
19.400.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp.  
150.000.000
7. Tanah Seluas 1696 m2 di PESISIR SELATAN, HASIL SENDIRI Rp.  
60.000.000
8. Tanah Seluas 179 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp.  
170.000.000
9. Tanah Seluas 1800 m2 di PESISIR SELATAN, HIBAH DENGAN  
AKTA Rp. 90.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 850.000.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINI BUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.  
175.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI



Rp. 425.000.000

3. MOBIL, HONDA HRV RU1 1.5 E CVT CKD Tahun 2016, HASIL

SENDIRI Rp. 250.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 290.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 8.395.325

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 4.249.395.325

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 4.249.395.325

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.